

Sejarah Sistem Pendidikan Indonesia: Masa Penjajahan, Masa Kemerdekaan, Masa Reformasi-Sekarang

Hilda Lutfiya¹, Himatul Uliya², Ida Martafia Putri³, Mambaul Ngadhimah⁴

¹Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, ²Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, ³Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, ⁴Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhamad Besari Ponorogo

hildalutfiya.fiya@gmail.com, aliyaahima179@e-mail.com, idamartafia@gmail.com, mambaul@iainponorogo.ac.id

DOI : 10.55656/ksij.v7i2.420

Submitted: (2025-06-03) | Revised: (2025-06-12) | Approved: (2025-06-20)

Abstract

This journal examines the development of the education system in Indonesia from the Dutch colonial period to the reform era, focusing on the educational policies implemented and their impact on society. This research uses qualitative methods with a literature study approach, collecting primary data from key literature and secondary data from related articles and journals. The results of the analysis show that during the colonial period, education was discriminatory and only benefited a handful of elites, whereas during the New Order era, there was success in literacy eradication programs and the implementation of a six year compulsory education which later expanded to ten years. The journal also highlights the importance of curriculum changes to improve the quality of education and to adapt to the demands of the times.

Keywords: Education System, Curriculum, Education Policy

Abstrak

Jurnal ini mengkaji perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga era reformasi, dengan fokus pada kebijakan pendidikan yang diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data primer dari literatur utama dan data sekunder dari artikel serta jurnal terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama masa kolonial, pendidikan bersifat diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintir elit, sedangkan pada masa Orde Baru, terdapat keberhasilan dalam program pemberantasan buta huruf dan penerapan wajib belajar enam tahun yang kemudian berkembang menjadi sembilan tahun. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya perubahan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Kata kunci: Sistem Pendidikan, Kurikulum, Kebijakan Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah upaya yang direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang berguna di masyarakat. Secara mendasar, pendidikan adalah proses humanisasi yang lebih dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Dalam pengertian yang lebih sederhana, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri yang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran di berbagai bentuk institusi pendidikan baik yang formal, informal maupun nonformal. (Dzakiyya Azizah dkk., 2024, hlm. 218)

Pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi besar sepanjang sejarahnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya di setiap era. Pada masa penjajahan, pendidikan di Indonesia lebih difokuskan untuk mendukung kekuasaan kolonial, dengan sistem yang diskriminatif terhadap rakyat pribumi. Akses pendidikan formal hanya diberikan kepada golongan tertentu, sementara mayoritas rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan yang layak untuk memperoleh pendidikan. Pada waktu itu, pendidikan berfungsi untuk menjaga dominasi kolonial tanpa memperhatikan pemerataan sosial (Idris & Tolla, 2024, hlm. 1495). Indonesia ketika masa penjajahan, pendidikan sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai dan kepentingan penjajah. Masa itu, pendidikan sangat dipengaruhi kolonialisme sebagai para penguasa mengatur berbagai kebijakan pendidikan dan praktik penerapan pendidikan. Para kolonial saat itu memanfaatkan para pribumi sebagai budak penjajah dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan kolonial di Indonesia (Habsy dkk., 2024). Namun, beberapa tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara berusaha mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dengan mendirikan Taman Siswa, yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berbasis pada budaya lokal dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali (Idris & Tolla, 2024, hlm. 1495).

Bank Dunia (World Bank) mengemukakan bahwa meskipun akses pendidikan di Indonesia sudah sangat luas, kualitas pendidikan yang ada masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Akses pendidikan yang luas tersebut tercermin dari banyaknya sekolah sebagai bagian dari pendidikan formal di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah. Sekolah-sekolah ini terbuka bagi semua anak-anak di Indonesia, tanpa memandang ras, golongan, status sosial, atau faktor lainnya. Dengan demikian, tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan golongan atau status sosial. Itulah alasan mengapa pendidikan di Indonesia telah diberikan akses yang sangat luas. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi pendidikan di masa sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, di mana pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti anak-anak bangsawan. Masyarakat kecil pada waktu itu tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah karena dianggap tidak layak.

Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik ini sebaik-baiknya sebagai bekal untuk masa depan. (Nurwahyuni, 2021, hlm. 54)

Berdasarkan uraian diatas maka penting untuk membahas, *Pertama*, bagaimana sejarah sistem pendidikan Indonesia masa penjajah, *Kedua*, masa kemerdekaan, *Ketiga*, masa reformasi sampai sekarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, artikel, buku dan jenis sumber lainnya yang membahas tentang sejarah sistem pendidikan Indonesia masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa reformasi-sekarang. Literatur yang dipilih berdasarkan relevansinya dan kontribusinya untuk topik penelitian dengan fokus pada sejarah pendidikan dari masa penjajah, kemerdekaan dan masa reformasi hingga saat ini. Penelitian studi pustaka ini penting untuk dilakukan dengan tujuan agar pembaca mengetahui dan memahami sejarah perkembangan sistem pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang terdiri dari jenis data primer dan sekunder. Dalam kasus ini, data primer diperoleh dari studi kritis literatur utama yang merupakan sebagai fokus utama penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung, seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengaitkan informasi untuk menemukan pola dan tema utama yang mendukung hipotesis dan tujuan penelitian. Hasil analisis disusun dalam narasi yang mendukung hipotesis dan tujuan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masa Penjajahan

Masa kolonial Belanda

a. Sejarah Sistem Pendidikan

Pada awalnya, Belanda datang ke Nusantara hanya untuk dagang. Namun karena kekayaan alamnya yang luar biasa, tujuan utama mereka berubah menjadi untuk menguasai dan menanamkan pengaruh pada bangsa Indonesia. Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan dengan Indonesia akan tetapi secara berkelanjutan menundukkan para penguasa lokal dan merampas daerah-daerahnya sebagai kekuasaannya sehingga berlangsunglah sistem penjajahan terjadi (Hasnida, 2017, hlm. 245).

Pada abad 19 pemerintahan Belanda mulai memberikan pendidikan Barat

kepada orang Belanda dan beberapa orang Indonesia, terutama keluarga bangsawan. Sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam hal dikotomi pendidikan. Pengaruh perbedaan pendidikan antara penduduk pribumi dan non-pribumi menyebabkan perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan pribumi biasanya berpusat pada keterampilan praktis dan pelayanan, sementara pendidikan non pribumi memiliki akses yang lebih luas ke pendidikan formal yang lebih maju. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin pribumi yang setia kepada penjajah, tetapi tidak memberikan ruang bagi masyarakat pribumi untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh (Habsy dkk., 2024, hlm. 4680).

Pemerintah memberikan politik etis yaitu mewajibkan pendidikan untuk rakyat biasa yang menyebar sampai kepedesaan (Maunah, 2011, hlm. 111). Pendirian sekolah ini merupakan prinsip dasar dari politik etis, politik etis menarik perhatian bagi semua pihak yang menentang pemerintahan kolonial Belanda dari sudut pandang sosial dan politik terutama masyarakat pribumi. Sebenarnya kebijakan etis ini bagian dari kepentingan kolonial Belanda untuk memperluas pemanfaatan terhadap Indonesia.

Penyediaan pendidikan kepada pribumi ini merupakan upaya melawan pendidikan Islam yang terus berkembang yang dianggap berbahaya oleh pemerintahan Belanda, namun tetapi dampaknya malah berbalik pendidikan yang diberikan Belanda ini mengubah kehidupan para pribumi secara drastis, terutama dalam hal politik dan ekonomi. Dan hal ini akan membawa dampak negatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda karena sejumlah kelompok terpelajar di Indonesia mendorong nasionalisme Indonesia. Setelah itu beberapa kebijakan dilaksanakan salah satunya yaitu kesetaraan pendidikan, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa sekolah berada pada tingkat yang sama dengan sekolah di Belanda. Kebijakan tersebut bertujuan untuk pemindahan para siswa Hindia Belanda ke sekolah Belanda. Setelah politik etis memiliki peran dan pengaruh pada pendidikan, pemerintah menetapkan bahasa pengajaran harus menggunakan bahasa Belanda di setiap sekolah. Tujuan pendidikan pribumi disetarakan supaya sesuai dengan dibutuhkannya dan golongan masyarakatnya. Pendidikan diatur langsung oleh pemerintahan pusat Belanda (Novriyanto dkk., 2022, hlm. 93).

Memenuhi kebijakan politik etis ini Belanda mendirikan beberapa sekolah untuk para pribumi baik jenjang dasar sampai jenjang tinggi. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdiri dari tiga tahap yaitu Pendidikan dasar terdiri dari pengantar bahasa daerah dan bahasa Belanda, serta sekolah peralihan, Pendidikan lanjutan yang terdiri dari sekolah umum dan kejuruan, Pendidikan Tinggi. (Prayudi & Salindri, 2015, hlm. 22).

Perjuangan politik menuju kemerdekaan mencangkup fokus pada pendidikan nasional di pemerintahan Belanda sebelum kemerdekaan. Ini terlihat dari berdirinya organisasi pemuda yang didirikan oleh siswa yaitu Trikoro Dharmo (tiga tujuan mulia)

yang didirikan oleh DR. R Satiman pada 17 Maret 1915, lalu diberbagai daerah mulai berdiri gerakan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, Sampai Budi Utomo (Oktarina dkk., 2021, hlm. 46).

b. Kurikulum

Kurikulum merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah untuk mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai tujuan, seperti mengatur strategi dalam proses belajar, mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Oleh karena itu Oemar Hamalik mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pembelajaran yang harus dilakukan siswa (Wahyuni, 2015, hlm. 232).

Pada masa kolonial Belanda, terdapat dua model pendidikan dikembangkan selama pemerintahannya yaitu sekolah satu untuk anak pekerja Hindia Belanda dan kelas dua untuk anak-anak pribumi. Sekolah kelas satu berlangsung selama empat tahun, kemudian lima tahun dan terakhir tujuh tahun. Sekolah kelas dua berlangsung selama tiga tahun, kurikulum diajarkan untuk anak pribumi yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Di kelas satu materi yang diajarkan adalah geografi, sejarah, dan ilmu kehidupan. Sedangkan Gimnasium dibangun untuk anak-anak ningrat di tingkat pendidikan menengah, pendidikan ini berlangsung selama tiga tahun materi yang diajarkan adalah bahasa Belanda, bahasa Inggris, aritmatika, aljabar, geometrik, ilmu alam atau kimia, sejarah dan pembukuan. MULO (Meer Uitgebreid Lager Orderwijs) menggantikan gimnasium sebagai paradigma pendidikan, dan sekolah berlangsung selama empat tahun (Hidayat dkk., 2023, hlm. 37). Sistem pendidikan pada masa Belanda terdapat beberapa tingkatan yaitu:

- 1) *Europeesche Lagere School* (ELS) yaitu sekolah pendidikan dasar pada masa zaman kolonial Belanda yang ada di Indonesia. ELS berdiri pada tahun 1817, ELS ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa wajibnya dalam proses pembelajaran, ELS ini hanya untuk keturunan Belanda dan keturunan pribumi dari priyayi atau tokoh terkemuka. Masa sekolah ELS ini selama 7 tahun. Pada tahun 1903 ELS mulai memberikan peluang belajar kepada orang-orang pribumi dan keturunan Tionghoa. Pembelajaran yang diajarkan yaitu membaca, menulis dan menghitung.
- 2) *Hollandsch Chineesche School* (HCS) merupakan sekolah khusus bagi keturunan Tionghoa dan Hindia Belanda yang dicetuskan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1908 dengan masa belajar selama 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan adalah Bahasa Belanda, membaca, menulis, menghitung, sejarah, ilmu bumi dan keterampilan seperti bijbel dan bahasa Inggris.
- 3) *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) adalah sekolah yang didirikan pada tahun 1914, HIS ini untuk keturunan asli Indonesia seperti pada anak-anak keturunan tokoh-tokoh terkemuka dan priyayi. Masa belajar sama seperti ELS dan HCS yaitu 7 tahun, dan merupakan termasuk pada pendidikan dasar atau rendah. Awal mulanya HIS ini hanya untuk para kaum elit, setelah ada kebijakan politik etis



maka menjadilah sekolah yang terbuka untuk anak kalangan bawah.

- 4) MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), MULO merupakan pendidikan lanjutan, bisa dikatakan sebagai pendidikan dasar yang luas atau istilahnya sekarang adalah sekolah menengah pertama, MULO didirikan pada tahun 1916. Setelah selesai dari sekolah dasar bisa melanjutkan ke MULO. Jenjang pendidikan MULO ini selama 3 tahun bagi lulusan ELS namun untuk lulusan selain ELS terdapat kelas tambahan yaitu kelas persiapan jadi total masa belajar bagi lulusan selain ELS adalah 4 tahun. Pada jenjang MULO ini kurikulum yang diajarkan adalah membaca, bahasa Belanda, aritmatika, sejarah Belanda, sejarah Dunia, geografi, sains, bahasa Inggris dan Jerman, serta menggambar.
- 5) AMS (*Algemeene Middelbare School*) merupakan sekolah lanjutan dari MULO dan sebagai sekolah persiapan masuk pada perguruan tinggi yang berdiri pada tahun 1919, pada masa sekarang AMS ini setara dengan SMA masa belajarnya selama 3 tahun.
- 6) Pada tahun 1920 didirikannya Perguruan Tinggi (PT) dalam bidang teknik, hukum dan pertanian. Akan tetapi sebelum perguruan tinggi ini didirikan ada sekolah dengan jenjang yang mirip dengan perguruan tinggi yang dikenal sebagai STOVIA, yang didirikan pada tahun 1902 (Prayudi & Salindri, 2015, hlm. 24-25).

Masa Kolonial Jepang

a. Sejarah Sistem Pendidikan

Belanda meninggalkan Indonesia setelah Jepang mengalahkan pada 8 Maret 1942. Jepang menjadi negara yang kuat di Asia dan bercita-cita menjadi pemimpin Asia Timur (Jumaisa, 2022). Jepang telah memulai perluasan militer ke negara-negara sekitarnya sejak tahun 1940, dengan niat untuk membentuk Asia Timur Raya dan memperluas pengaruh dan wilayahnya. Jepang melihat Indonesia sebagai potensi yang dapat membantu tujuan besarnya, dan konsep “Hakko Ichiu” yang berarti kemakmuran bersama Asia Timur Raya, dan semboyan “Asia untuk Bangsa Asia.” Kepentingan pengelolaan pendidikan Indonesia oleh Jepang tidak dapat diabaikan (Muslimin & Hudaidah, 2021, hlm. 131).

Jepang berusaha untuk menguasai sistem pendidikan di Indonesia, Jepang melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia, tetapi tujuan utama Jepang tetap sama yaitu menguasai dan menjajah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, Jepang merancang berbagai kebijakan yang dapat mendukung perang Jepang di Indonesia (Hudaidah & Karwana, 2022, hlm. 98).

Pendidikan yang diberikan selama masa kedudukan Jepang menunjukkan kepentingan identitas kekuasaan terhadap Indonesia. Jepang dengan gerakan 3A nya ternyata berhasil menarik perhatian rakyat Indonesia. Pada tanggal 29 April 1942 dibentuk sebagai tujuan untuk mendapat simpati rakyat Indonesia dengan menyebarkan propaganda militer Jepang. Akhirnya motto 3A Jepang yang memiliki arti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia berpengaruh

besar pada ranak aspek kehidupan rakyat Indonesia, termasuk pada pendidikan. Pendidikan Jepang memungkinkan orang Indonesia untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan Jepang yaitu “Kemakmuran Bersama Asia Raya”. Pada akhirnya pendidikan mulai bergeliat dengan dibukanya sekolah seperti sekolah desa juga dikenal sebagai *Volk School* (dalam bahasa Belanda), sekolah selanjutan *Vervlog School*, sekolah pribumi lengkap *Volledige Tweede Klas School*, dan sekolah lanjut *Putri Meisjes Vervlog School* semua sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 12 pada 29 April 1942 memberitahukan bahwa mengizinkan sekolah lokal dibuka kembali (Farid dkk., 2023, hlm. 219).

Tujuan pendidikan pada masa Jepang tidak dibicarakan secara terbuka dan tidak diumumkan secara luas yang disebabkan perang dunia II yang sedang terjadi. Jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda terhadap pendidikan lebih rendah yang disebabkan Jepang fokus pada kemenangan perang melawan sekutu. Meskipun minat pada pendidikan rendah, Indonesia masih mendapat manfaat secara tidak langsung, namun ada beberapa hal yang menguntungkan dari kebijakan pendidikan baru ini seperti penyebaran bahasa Indonesia di seluruh pulau, terjemahan buku asing ke dalam bahasa Indonesia, latihan bela diri dan perang, dan penghapusan diskriminasi ras sehingga semua orang di masyarakat memiliki peluang pendidikan yang sama (Ambiya & Jasyusman, 2022, 4).

b. Kurikulum

Pada masa pemerintahan Jepang, semua sekolah rendah berbagai tingkatan dihapus dan hanya tinggal sekolah rakyat yang disebut *Kokumin Gako* yang masa belajarnya selama 6 tahun. Sekolah ini kurang memperhatikan isi, mengajarkan pada anak-anak untuk membantu Jepang dalam perang sehingga mereka harus mengikuti latihan militer, memberikan pelajaran olahraga, dan menyuruh anak-anak untuk menanam pohon jarak untuk dibuat minyak demi kepentingan perang. Sedangkan kurikulum yang digunakan pada masa Jepang bertujuan untuk mengajarkan siswa untuk melindungi negara mereka, kurikulum yang diajarkan selama pemerintahan Jepang disesuaikan dengan keinginan rakyat Jepang. Dimulai dengan perubahan bahasa, dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang, dan mata pelajaran ilmu pasti seperti yang diajarkan di MULO (Meer Uitgebreid Lager Orderwijs) atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama pada zaman Belanda yaitu bagian ilmu pasti alam, yang pada awalnya fokusnya berada di Belanda tetapi berubah berpusat pada Jepang. Pada tahun 1942, AMS milik Belanda digantikan oleh Jepang menjadi sekolah tinggi (SMT) yang membutuhkan waktu belajar 3 tahun. Rencana pelajaran SMT ini memiliki banyak isi penting seperti bahwa bahasa Belanda dilarang untuk digunakan, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan pengantar, bahasa Jepang harus dipelajari, adat istiadat Jepang diajarkan dan sejarah Jepang menjadi sangat penting untuk dipelajari (Iramdan - & Manurung, 2019, hlm. 90).

Bergantinya kependudukan dari Belanda ke Jepang, banyak hal berubah termasuk pada bidang pendidikan. Ini dapat dilihat dari banyaknya sistem dan

peraturan yang berubah dan dihapus, Jepang menerapkan perpaduan antara kurikulum Jepang dan kurikulum lokal di Indonesia. Pemerintah Jepang harus menata ulang pendidikan di Indonesia setelah mekanisme pendidikan Belanda dihapus (Ramadhani, 2021a, hlm. 14).

Dalam pendidikan Jepang sistem pendidikan terintegrasi. Kebijakan pendidikan pemerintahan Jepang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi saat membangun sistem pendidikan. Pada masa Jepang, pendidikan mulai diberikan kepada orang-orang dari semua latar belakang. Masyarakat mendapatkan pendidikan secara formal pada jenjang SD selama 6 tahun masa belajar, SMP selama 3 tahun masa belajar, dan SMA selama 3 tahun masa belajar. Karena dianggap sebagai warisan dari Jepang, sistem ini masih digunakan di Indonesia sampai sekarang. Pendidikan militer di Jepang dirancang untuk perang, sehingga siswa harus mengikuti kelas latihan dasar militer dan menghafalkan lagu kebangsaan Jepang dan Indonesia. Bahasa Jepang harus digunakan oleh guru sebagai pengganti bahasa Belanda. Terdapat hal yang menarik yaitu rakyat diwajibkan untuk menghormati kepada dewa matahari (Seikerei), lagu kebangsaan Jepang (Kimigoyo) biasanya dinyanyikan setelah penghormatan. Oleh karena itu tidak semua warga Indonesia menyukai kebiasaan ini terutama mereka yang beragama Islam, penerapan keduanya ditentang keras KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Zainal Mustafa merupakan pengasuh Pesantren Sukamanah di Jawa Barat adalah salah satu ulama yang menentang (M. Wahib Mh dkk., 2022, hlm. 86-87).

Usaha untuk menyebarkan ideologi Hakko Ichiu melalui sekolah dimulai dengan latihan guru, guru-guru ditugaskan untuk menyebarkan ideologi baru setiap daerah mengirimkan perwakilan ke Jakarta untuk mendapatkan pelatihan dari pemimpin Jepang dan materi di setiap sekolah harus ditambahkan pelajaran bahasa Jepang, olahraga dan kerja bakti, siswa harus berpartisipasi dalam upacara setiap senin, senam pagi (*taiso*), baris-berbaris dan lari hal ini merupakan untuk kepentingan Jepang, Jepang menekankan pelajaran fisik dan kemiliteran ini. Tujuan Jepang adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan mempersiapkan siswa untuk perang Asia Raya (Ramadhani, 2021b, hlm. 18).

Masa Kemerdekaan

Orde Lama

a. Sejarah Sistem Pendidikan

Secara umum, pendidikan pada masa Orde Lama setelah kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Soekarno, memberikan kebebasan bagi perkembangan pendidikan. Pemerintahan yang berlandaskan sosialisme ini menjadi pedoman utama dalam membentuk dan menjalankan sistem pendidikan, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. (Aisy & Hudaidah, 2021, hlm. 574)

Menurut Bakhrudin Al Habsy dan Alifia Puteri yang dikutip oleh Fadli dan

Kumalasari, pendidikan pada masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan dengan berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara. Namun, saat itu masih sebatas pada tahap perumusan, karena belum dijabarkan secara rinci mengenai penerapan dasar tersebut dalam setiap proses pembelajaran. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama dapat ditelusuri melalui pembagian waktu berdasarkan peristiwa penting dan tonggak sejarah, yaitu periode 1945–1950 dan 1950–1966. Pada periode 1945–1950, sistem pendidikan masih melanjutkan pola yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang, termasuk penggunaan rencana pembelajaran yang serupa serta penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Tetapi, pemerintahan Indonesia diberlakukan secara berbeda. Periode ini sudah ditentukan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pengajaran dari semua lapisan masyarakat. Tidak seperti masa kolonial, ketika akses pendidikan hanya terbatas bagi kelompok masyarakat tertentu. Sistem pendidikan ini dimulai dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi atau Sekolah Tinggi Republik. Sedangkan ketika periode 1950-1966 melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai sistem pendidikan yang telah diatur sedemikian rupa. Dan itu semua sudah diatur mengenai pendidikan nasional sejak pasca proklamasi kemerdekaan tertera di dalam UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada tahun 1961, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 yang mengatur tentang pendidikan tinggi. Kemudian, disusul dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 mengenai Majelis Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 yang membahas dasar-dasar sistem pendidikan nasional.(All Habsy dkk., 2024, hlm. 247)

b. Kurikulum

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, sistem pendidikan mengalami perubahan dalam kurikulum. Kurikulum pada masa Orde Lama diterapkan sejak tahun 1945 hingga 1965, dengan beberapa di antaranya sebagai berikut:

1) Kurikulum 1947 “Rentjana Pelajaran 1947”

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, lahirlah Kurikulum 1947. Dalam Bahasa Belanda, kurikulum ini dikenal dengan sebutan *Leerplan*, yang berarti rencana pembelajaran. Sementara itu, istilah "kurikulum" dalam Bahasa Inggris belum begitu dikenal luas oleh masyarakat saat itu. Kurikulum 1947 memiliki nuansa politis, karena pada awalnya mengikuti sistem pendidikan Belanda, namun kemudian diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional. Pada masa kolonial, sistem pendidikan dikenal bersifat diskriminatif, di mana sekolah-sekolah dibangun dengan pelayanan yang berbeda-beda bagi anak-anak Belanda, keturunan Timur Asing, dan anak-anak pribumi. Bagi masyarakat pribumi sendiri, pendidikan dibedakan lagi berdasarkan status sosial, yaitu antara golongan bangsawan dan kalangan atas. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan kurikulum tidak terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, melainkan lebih diarahkan pada pembentukan karakter, seperti penanaman semangat nasionalisme. Dalam

Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947, struktur programnya terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan bahasa daerah dan Bahasa Indonesia. Struktur mata pelajaran dalam Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947 disusun secara terpisah-pisah, yang dikenal dengan istilah *separated curriculum*. Kurikulum ini masih tergolong sederhana, karena fungsinya hanya sebatas sebagai rencana pembelajaran di dalam kelas dan belum mencakup seluruh pengalaman belajar peserta didik, baik di lingkungan kelas maupun di luar kelas.

2) Kurikulum 1952 “Rencana Pelajaran Terurai”

Pada tahun 1952, dilaksanakan perbaikan pada kurikulum yang selanjutnya dikenal dengan nama kurikulum 1952 dan diberi nama “*Rentjana Pelajaran Terurai*”. Kurikulum ini memberikan rincian yang lebih mendalam pada setiap mata pelajaran, meskipun istilah “kurikulum” sendiri belum digunakan pada saat itu. Struktur Kurikulum 1952 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 1947, namun pada kurikulum ini tujuan pendidikan nasional mulai dijadikan sebagai arah utama pengembangannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah menjadi faktor yang mempengaruhi lahirnya Kurikulum 1952. Kehidupan yang berkualitas sangat terkait dengan pendidikan karakter, yang menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan kurikulum. Kehidupan sehari-hari di masyarakat yang bersifat tematik menjadi aspek utama dan ciri khas dalam Kurikulum 1952. Dalam Rentjana Pelajaran Terurai 1952, mata pelajaran dikelompokkan ke dalam lima bidang studi, yaitu moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan fisik. (Anitasari & Cahyono, 2023, hlm. 95)

3) Kurikulum 1964 “Rentjana Pendidikan 1964”

Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia mengalami pembaruan kembali. Dalam Rentjana Pendidikan 1964, perhatian utama diberikan pada pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep ini mengharuskan setiap sekolah untuk membimbing siswa agar dapat berpikir secara mandiri dan menyelesaikan masalah terhadap masalah yang ada. Dengan demikian, konsep kurikulum 1964 menekankan pada peran aktif, kreativitas, dan produktivitas peserta didik dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode pembelajaran dalam kurikulum 1964 menerapkan prinsip gotong royong terpimpin. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Krida setiap hari Sabtu, yaitu hari di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti olahraga, permainan, seni, dan kebudayaan. Kurikulum ini diharapkan menjadi sarana untuk membentuk manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan bersifat sosialis, sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam TAP MPRS No. 11 Tahun 1960. (Anitasari & Cahyono, 2023, hlm. 95-96)

Orde Baru

a. Sejarah Sistem Pendidikan

Pada tahun 1966–1968 Indonesia mengalami masa transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Saat itu terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto (Dewi Ningrum, 2023, hlm. 63). Pada periode Orde Baru ini, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya. Beberapa program pendidikan di Orde Baru berhasil karena rezim Orde Baru memiliki semangat pada pembangunan yang menempatkan pendidikan dalam skala prioritas utama sehingga meskipun kala itu anggaran bagi sektor pendidikan masih sangat terbatas, akan tetapi pemerintah tetap mampu melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan mendapatkan hasil yang positif (Ramadhan dkk., 2024, hlm. 52).

Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah masa Orde Baru memiliki tujuan ialah untuk mencerdaskan putra-putri Indonesia setinggi-tingginya dengan mempunyai perilaku budi pekerti yang baik. Tujuan itu berlaku untuk seluruh daerah yang masuk dalam wilayah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keberhasilan pendidikan yang dilakukan masa Orde Baru diantaranya:

1) Berhasil dalam menerapkan program pemberantasan buta huruf

Pemberantasan buta huruf merupakan salah satu kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru yang dimana masyarakat masih mengalami buta huruf yang masih tergolong tinggi, terutama pada kelas bawah. Masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai masa dimana melakukan pemberantasan terhadap buta huruf yang sudah dilakukan oleh presiden Soekarno, hanya saja belum sampai merata. Melihat hal tersebut, Presiden Soeharto bekerjasama dengan menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk berusaha merumuskan suatu kebijakan untuk memutus angka kebodohan masyarakat dengan memberantas buta huruf yang dilakukan tahun 1972. Sepuluh tahun setelah program pemberantasan buta huruf, dapat dikatakan 90 % orang bisa melakukan baca tulis sehingga tingkat masyarakat yang masuk sekolah pun semakin tahun mengalami peningkatan (Ramadhan dkk., 2024, hlm. 47-48).

2) Berhasil melaksanakan program wajib belajar selama 6 tahun

Program wajib belajar selama 6 tahun merupakan salah satu inisiatif pendidikan yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa Orde Baru yang kemudian berkembang menjadi program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 6 tahun ini, dimulai pada tahun 1974 dengan pembentukan banyak SD Inpres di seluruh Indonesia, sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang memadai. Program ini juga terkait dengan upaya pemberantasan buta huruf, dengan syarat masyarakat yang ingin mengikuti program wajib belajar 6 tahun harus dapat membaca dan menulis dengan baik (Ramadhan dkk., 2024, hlm. 48).

3) Berhasil menerapkan program beasiswa bagi anak Indonesia dengan daya

intelektual tinggi namun ekonomi rendah

Pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1974, melalui Yayasan Supersemar, Presiden Soeharto memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia mulai dari jenjang SD sampai Universitas, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan sampai selesai. Tujuannya ialah untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti. Program beasiswa ini terbukti berhasil, terlihat dari banyaknya siswa dan mahasiswa dengan latarbelakang ekonomi yang kurang mampu yang berhasil menjadi pribadi-pribadi sukses yang mengangkat nama Indonesia dan membawa martabat bangsa yang baik (Ramadhan dkk., 2024, hlm. 49).

Pemerintah memang berhasil dalam melakukan sebagian dari kebijakan pendidikannya, namun ada kegagalan yang terjadi di beberapa program pendidikan lain yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Pemerintah Orde Baru yang dikenal dengan fokus pada pembangunan, lebih mengarahkan pendidikan nasional pada tujuan pembangunan nasional yang sedang marak terjadi saat itu, daripada fokus pada esensi pendidikan itu sendiri. Manfaat pendidikan tersebut untuk mengeksploitasi intelektualitas para pelajar demi hasrat kepentingan penguasa.
- 2) Pemerintah Orde Baru dalam menerapkan program pendidikannya tidak seimbang, hanya menekankan pada aspek kuantitas saja tanpa memperhatikan aspek kualitas.
- 3) Pemerintah Orde Baru secara ketat menerapkan pola keseragaman sebagai ideology dalam melakukan pengujian terhadap kemampuan para pelajar sejatinya tidak dapat disamakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Karena hal ini akan menimbulkan stratifikasi intelektual dikalangan siswa, tindakan kecurangan dalam pelaksanaan ujian baik itu dilakukan murid maupun oknum sekolah.
- 4) Pemerintah Orde Baru yang sentralistik dalam pengembangan bidang pendidikan nasional memberikan kemudahan pemerintah dalam mengontrol jalannya penyelenggara pendidikan agar sesuai kehendaknya (Ramadhan dkk., 2024, hlm. 52-53).

Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru dirancang secara nasional, namun pelaksanaannya lebih diarahkan untuk memperkuat hegemoni pemerintah Orde Baru di mata masyarakat. Alokasi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sangat terbatas untuk sektor pendidikan membuat bidang ini menjadi sangat lemah dan kesulitan dalam mengatasi berbagai permasalahan, meskipun hal tersebut telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989 (Fathiya dkk., 2024).

b. Kurikulum

- 1) Kurikulum 1968



Kurikulum ini fokus pada pendekatan organisasi materi pelajaran, yang terdiri dari kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Materi pelajaran lebih bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan situasi nyata di lapangan. Pada masa ini, siswa berperan hanya sebagai individu yang pasif, yang lebih banyak menghafal teori tanpa penerapan praktis. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditekankan dalam kurikulum ini, yang lebih menyoroti pengembangan intelektual peserta didik saja.

2) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 muncul sebagai dampak dari pembangunan nasional yang terjadi akibat berbagai perubahan signifikan, terutama sejak tahun 1969. Beragam faktor memengaruhi program dan kebijakan pemerintah yang akhirnya mendorong terjadinya pembaruan kurikulum tersebut. Kurikulum ini bersifat sentralistik, dimana pemerintah pusat yang menyusunnya dan sekolah-sekolah hanya melaksanakan. Kurikulum ini mengedepankan prinsip agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Namun, kurikulum ini banyak mendapat kritik di lapangan karena guru lebih fokus pada penyusunan rincian tujuan yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran.

3) Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan mengadopsi pendekatan berbasis proses. Dalam pembelajaran ini, siswa ditempatkan sebagai subjek utama. Metode yang digunakan dikenal dengan *Aktif Learning*, di mana siswa terlibat secara langsung mulai dari mengamati, mengelompokkan, berdiskusi, hingga menyampaikan hasilnya. Namun, banyak sekolah mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum ini secara efektif, sehingga siswa seringkali tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan justru menimbulkan keributan di kelas (Anitasari & Cahyono, 2023, hlm. 96).

4) Kurikulum 1994

Kebijakan kurikulum ini lebih mengutamakan prinsip *link and match* pada pendidikan kejuruan. Prinsip *link and match* menekankan pentingnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, di mana sekolah diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri. Sebaliknya, dunia industri juga perlu menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan (Aprianti & Maulia, 2023, hlm. 185).

Tujuan dari kurikulum ini lebih fokus pada materi pelajaran dan pengembangan keterampilan serta penyelesaian soal dan pemecahan masalah. Namun, dalam kurikulum ini, hubungan antara tujuan dan proses pembelajaran kurang berhasil untuk diintegrasikan dengan baik. Porsi materi muatan nasional dan muatan lokal sangat banyak, dengan materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, seperti: Bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lainnya. Akibatnya kurikulum 1994 ini menjadi sangat padat sehingga hasil yang diperoleh kurang optimal (Anitasari & Cahyono, 2023, hlm. 96-97).

Masa Reformasi-Sekarang

a. Sejarah Sistem Pendidikan

Setelah presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tahun 1998, dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah termasuk otonomi Pendidikan. pada masa ini, Pendidikan diberikan ruang seluas-luasnya untuk dapat berkembang dengan bebas. Bahkan, aturan-aturan pada masa orde baru ditinjau Kembali dan apabila ada aturan yang menghambat kebebasan siswa akan dicabut. Sistem Pendidikan Indonesia pada masa reformasi juga mengalami beberapa pergantian kurikulum. *Pertama*, kurikulum 1999 yang merupakan lanjutan dari kurikulum 1994 dengan sedikit perubahan. *Kedua*, kurikulum 2004 atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). *Ketiga*, kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar dan guru dituntut untuk dapat mengembangkannya dalam bentuk silabus. *Keempat*, kurikulum 2013.

Kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah Reformasi pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama Orde Baru dan dianggap berbahaya bagi masyarakat. Masalah ini antara lain memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya, atau lebih dikenal dengan menumbuhkan praktik demokrasi dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Ini diberikan kepada masyarakat karena demokrasi tidak ada di zaman Orde Baru. Kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2003 memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengendalikan sebagian dari pemerintahan. Kebijakan ini dibuat karena pemerintahan Orde Baru menggunakan pendekatan sentralistik, di mana segala sesuatu harus ditentukan dan diputuskan oleh pusat. mengembalikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke fungsi dan peran utamanya sebagai alat negara, bukan alat penguasa, dan bekerja secara profesional (Ikhwan, 2017, hlm. 25).

b. Kurikulum

1) Kurikulum 2004, “KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)”

Kurikulum 2004 adalah revisi dari kurikulum sebelumnya yang berfokus pada input dan proses. Ini menyebabkan stagnasi pendidikan dan sulit untuk menyesuaikannya dengan tuntutan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan masyarakat global. kurikulum 2004 merupakan pengganti kurikulum 1994 yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran.

Tujuan utama kurikulum ini adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik,

sesuai dengan kondisi lingkungan. Kurikulum ini memiliki karakteristik berikut: menekankan ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal; berfokus pada keberagaman dan hasil belajar, Pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan, dan sumber belajar bukan hanya dari guru tetapi juga dari sumber belajar lainnya yang memenuhi elemen edukatif, Penilaian berdasarkan proses yang dilalui siswa dan hasil.(Insani, 2019, hlm. 56)

2) Kurikulum 2006

Kurikulum 2006 sering disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan berhak dan diiberi otonom seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulumnya. Sekolah memiliki wewenang luas untuk mengembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah (Nurhalim, 2018, hlm. 348).

Dalam pelaksanaannya tetap berpegang atau merujuk pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional standard yang dikembangkan oleh pemerintah, serta merujuk pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) yang telah ditetapkan melalui Permen Nomor 23 Tahun 2006 untuk Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen Nomor 22 Tahun 2006 untuk Standar Isi.

3) Kurikulum 2013

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Kurikulum 2013 menetapkan dua hal: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (taught curriculum) sebagai proses yang dibangun dari kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) yang disesuaikan dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik (Siregar, 2022, hlm. 52-53).

4) Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka Belajar 72 Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju Nadiem A Karim. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar murid memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai



perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat murid.

Hal yang paling utama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar yakni dengan mengetahui terlebih dahulu visi dari merdeka belajar. Visi dari merdeka belajar adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Terdapat 6 profil pelajar pancasila yang harus diketahui dalam kurikulum merdeka belajar yakni (1) beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia (2) mandiri (3) bernalar kritis (4) berkebhinekaan global (5) bergotong royong (6) kreatif. (mrizal1,2024, hlm. 2202)

Simpulan

Belanda datang ke Indonesia hanya ingin berdagang akan tetapi kemudian ingin menguasai dan mempengaruhi para pribumi. Ketidaksetaraan terjadi diantara keturunan Belanda dan Pribumi karena pemerintahan Belanda memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada mereka. Selanjutnya terdapat politik etis, yang mengatur pengadaan pendidikan di seluruh daerah hingga pedesaan. Banyaknya perubahan di bidang pendidikan transisi pemerintahan dai Belanda ke Jepang, termasuk peraturan dan kurikulum. Jepang berusaha untuk menguasai sistem pendidikan Indonesia dengan berbagai cara akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu menguasai dan menjajah Indonesia. Pada masa orde lama setelah kemerdekaan, pendidikan dibiarkan berkembang secara mandiri dan pemerintahan menjadikan sosial sebagai pedoman utama dalam pembentukan dan pengelolaan sistem pendidikan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan, sementara orde baru bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan budi pekerti yang baik. Dari reformasi hingga saat ini, kurikulum telah berubah beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 569-577. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327>
- All Habsy, B., Puteri Nugroho, A., & Shofa, S. Z. (2024). Sistem Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Ke Masa. *Urnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, Vol. 2, No. 4.
- Ambiya, S. A., & Jasyusman, I. (2022). *Penyelenggaraan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (1942- 1945)*. 6(1), 4.
- Anitasari, L., & Cahyono, A. (2023). Kurikulum Dan Pola Ilmu Pengetahuan Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru. *Social Science Academic*, 1(2).

- Aprianti, A., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan: Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagi Guru Dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1).
- Dewi Ningrum, S. U. (2023). Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Indonesia. *Lembaran Sejarah*, 19(1).
- Dzakiyya Azizah, H., Adil, B., & Nursyaban, A. (2024). Sejarah Pendidikan Di Indonesia Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5).
- Farid, I., Yulianti, R., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2023). Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Dari Mas Ke Masa. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 12(2), 216–220.
- Fathiya, S., Nur Aryadi, M. R., & Fawwaz, M. F. (2024). Transformasi Dan Pengaruh Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Baru Di Indonesia. *Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 3(1).
- Habsy, B. A., Irsu, A. F., Mutaqin, M. A., Pratanti, D., Sabella, A. S., Putratama, W. L., & Putricia, R. (2024). Landasan Historis Pendidikan Indonesia: Dari Masa Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 8(1).
<https://Gudangjurnal.Com/Index.Php/Gjmi/Article/Download/458/427/1623>
- Hasnida, H. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 237–256.
<https://Doi.Org/10.15408/Kordinat.V16i2.6442>
- Hidayat, S., Nurjanah, S., Utomo, E., & Purwanto, A. (2023). Perkembangan Pendidikan Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Tadbir Muwahhid*, 7(1), 31–46.
<https://Doi.Org/10.30997/Jtm.V7i1.7167>
- Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1(2), Article 2.
<https://Doi.Org/10.32502/Jdh.V1i2.4243>
- Idris, M., & Tolla, I. (2024). Evolusi Sistem Pendidikan Di Indonesia Sejarah Dan Perkembangan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2).
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 14–32.

- Iramdan -, & Manurung, L. (2019). Sejarah Kurikulum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2), Article 2.
- Jumaisa. (2022). *Sejarah Pendidikan* (Hlm. 349). Cendekia Publisher.
- M. Wahib Mh, Slamet Abadi, Khalifaturohmah, Aang Abdullah Zein, & Tri Novia. (2022). Studi Historis Perkembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 83-90. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.V5i4.336>
- Maunah, B. (2011). *Perbandingan Pendidikan Islam* (Hlm. 111). Penerbit Teras.
- Muslimin, Y., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Journal Of Practice Learning And Educational Development*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.58737/jpled.V1i3.8>
- Novriyanto, Y., Apriyana, S. B., & Komariyah, S. (2022). Pengaruh Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Indonesia: Awal Kebijakan Politik Etis Terhadap Pendidikan, Sistem Pendidikan Di Zaman Belanda, Lembaga Pendidikan Belanda. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.58540/jipsi.V1i1.17>
- Nurhalim, M. (2018). Analisis Perkembangan Kurikulum Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain Dan Pendekatan). *Insania : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16(3), 339-356. <https://doi.org/10.24090/insania.V16i3.1597>
- Nurwahyuni, K., & Hudaidah. (2021). Sejarah Sistem Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa: Sebuah Studi Literatur. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2).
- Oktarina, R., Wahyuni, D., Hendayani, F., & Japeri, J. (2021). Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan (Kebijakan Pendidikan Zaman Belanda, Kebijakan Pendidikan Zaman Kemerdekaan, Kebijakan Pendidikan Zaman Reformasi). *Jurnal Menata : Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), Article 1.
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education On Dutch Government In Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20-34.
- Ramadhan, F. S., Anggoro, N. R. C., Pramono, M. S., & Indradaffa, G. A. (2024). Sejarah Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru: Menguak Keberhasilan Dan Kegagalan Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Bidang Pendidikan. *Chronologia*, 6(1), 44-55. <https://doi.org/10.22236/jhe.V6i1.11920>



- Ramadhani, S. (2021a). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29408/Jhm.V8i1.3410>
- Ramadhani, S. (2021b). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29408/Jhm.V8i1.3410>
- Siregar, R. L. (2022). Landasan Pengembangan Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1).
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia). *Al-Adabiya : Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 10(2), Article 2.